



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALI AMRAN
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 8175

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 360.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/108 m2 di AGAM, WARISAN
Rp. 300.000.000
2. Bangunan Seluas 10 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 122.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 41.750.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 741.432

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 524.491.432

III. HUTANG Rp. 40.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 484.491.432

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.